Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 35853-35860

ANALISIS PENGARUH DAMPAK KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI UPT SAMSAT KOTA PEKANBARU

Hilma Rusdi[1], Sufian Hamim[2], Admiral[3] Raden Imam Al Hafis[4]

[1,2,3,4]Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nst., Pekanbaru, 28284, Indonesia

hilmarusdi@yahoo.com[1] sufianhamim@soc.uir.ac.id[2] admiral@law.uir.ac.id[3] imamalhafis@soc.uir.id[4]

Published: Juni , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan pajak daerah di Kantor Samsat Kota Pekanbaru. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PPN) dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembiayaan pembangunan daerah. Namun, banyak wajib pajak masih mengalami keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang berpotensi berdampak pada penerimaan pajak daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, dokumentasi, dan kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Pekanbaru. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan regresi sederhana untuk menentukan hubungan dan pengaruh keterlambatan pembayaran pajak terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kantor Samsat Kota Pekanbaru. Semakin tinggi tingkat keterlambatan pembayaran oleh wajib pajak, semakin rendah efektivitas penerimaan pajak daerah. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keterlambatan pembayaran meliputi rendahnya kesadaran wajib pajak, situasi ekonomi masyarakat, kurangnya pemahaman tentang sanksi pajak, dan minimnya sosialisasi dari pihak terkait.

Kata Kunci : Keterlambatan Pembayaran Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Pajak Daerah, Samsat Kota Pekanbaru.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah terus melaksanakan pembangunan nasional di berbagai sektor kehidupan. Agar pembangunan ini berjalan optimal, diperlukan dukungan keuangan yang memadai. Pendanaan pembangunan dapat diperoleh dari berbagai sektor, baik domestik maupun internasional, serta dari pemerintah dan sektor swasta. Salah satu sumber pendapatan domestik terbesar adalah sektor pajak. Pajak memainkan peran penting sebagai bentuk kontribusi dan partisipasi publik dalam mendukung pembangunan nasional, sekaligus berfungsi sebagai sarana bagi pemerintah untuk menyediakan layanan guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keseimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aspirasi masyarakat dan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang wajib berdasarkan undang-undang, tanpa mendapat imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Daerah provinsi mempunyai tanggung jawab memungut pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Jenis pajak provinsi terdiri atas:

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Pengalihan;
2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
3) Pajak Air Permukaan;
4) Pajak Rokok.

Pajak daerah memiliki berbagai sumber pendapatan, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang merupakan komponen penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dalam hal ini, pemerintah, melalui Unit Pelaksana Teknik Pendapatan Provinsi Riau, memiliki kepentingan yang signifikan dalam memantau pertumbuhan tahunan jumlah kendaraan bermotor, termasuk di Kota Pekanbaru.

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dipandang sebagai peluang potensial bagi pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dengan menetapkan kendaraan bermotor sebagai objek kena pajak. Situasi ini sejalan dengan fungsi anggaran pajak, yaitu sebagai sumber pembiayaan negara atau daerah. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk terus mengeksplorasi dan mengembangkan sumber pendapatan yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.

Sistem Administrasi Terpadu Satu Atap memainkan peran penting dalam administrasi Pajak Kendaraan Bermotor. SAMSAT harus melakukan kegiatan yang lebih intensif untuk meningkatkan penerimaan. Untuk meningkatkan penerimaan, Provinsi Riau telah membentuk 17 (tujuh belas) Unit Pendapatan dan 15 (lima belas) Unit Pendapatan Dinas Pendapatan Provinsi Riau, yang berlokasi di setiap Kabupaten/Kota. Salah satunya adalah UPT Pengelolaan Pendapatan dan Sistem Administrasi Terpadu Satu Atap Kota Pekanbaru.

Tren saat ini menunjukkan bahwa jumlah dan jenis kendaraan bermotor terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini didorong oleh pertumbuhan penduduk yang meningkat, yang pada gilirannya meningkatkan kebutuhan masyarakat akan transportasi untuk mendukung aktivitas dan mobilitas sehari-hari. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor ini menghadirkan potensi signifikan untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah, khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.

Selain itu, meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor telah mendorong peningkatan transaksi jual beli kendaraan, baik baru maupun bekas. Aktivitas ini juga berkontribusi pada pendapatan daerah melalui Biaya Pengalihan Kepemilikan Kendaraan Bermotor.

Namun, pada kenyataannya, banyak pemilik kendaraan bermotor masih kurang kesadaran untuk menjalani proses pengalihan kepemilikan kendaraan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti persepsi bahwa tidak melakukannya tidak akan menimbulkan hukuman atau denda yang berat. Selain itu, sebagian orang juga percaya bahwa proses pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor cukup rumit, memakan waktu, dan relatif mahal.

Tabel 1. Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor untuk Tahun 2022 hingga 2024

Tahun	Jumlah Kendaraan yang Tertunggak	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp)
2022	48.735 Unit	38.450.000.000
2023	56.820 Unit	45.780.000.000
2024	64.415 Unit	53.620.000.000

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Pekanbaru terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022, jumlah kendaraan yang

menunggak mencapai 48.735 unit, dengan total tunggakan pajak sebesar Rp38,45 miliar. Pada tahun 2023, angka ini meningkat menjadi 56.820 unit, dengan total tunggakan pajak sebesar Rp45,78 miliar, atau meningkat sebesar 19,06%.

Selanjutnya, pada tahun 2024, jumlah kendaraan yang menunggak kembali meningkat menjadi 64.415 unit, dengan jumlah tunggakan sebesar Rp53,62 miliar. Situasi ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru masih relatif rendah dan berpotensi berdampak pada penerimaan pajak daerah.

Meningkatnya tunggakan pajak kendaraan bermotor dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak, kondisi ekonomi masyarakat, sosialisasi pajak yang kurang optimal, dan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih efektif dari Samsat (Kantor Pajak Kendaraan Bermotor) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pengaruh Dampak Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah di UPT Samsat Kota Pekanbaru".

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

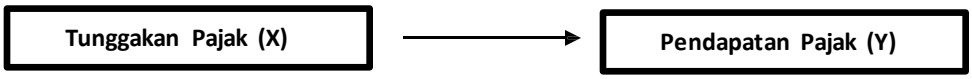
Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_o : Tunggakan pajak kendaraan bermotor tidak memengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Pekanbaru.

H_a : Tunggakan pajak kendaraan bermotor berdampak pada penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Pekanbaru.

Garis besar kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut: Gambar 1.

Kerangka Pemikiran



Informasi :

Berdasarkan hasil kerangka pemikiran tersebut, tunggakan pajak kendaraan bermotor memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

METODOLOGI PENELITIAN

Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menekankan variabel sebagai objek penelitian, dan variabel-variabel ini harus didefinisikan secara operasional. Tujuan utama melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif adalah untuk menguji teori, menetapkan fakta, menunjukkan hubungan dan pengaruh, serta membandingkannya antar variabel, memberikan statistik deskriptif, dan memperkirakan serta memprediksi hasilnya.

Regresi berguna untuk memprediksi sejauh mana satu atau lebih variabel independen memengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Analisis regresi yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana hanya digunakan untuk satu variabel independen dan satu variabel dependen. Tujuan metode ini adalah untuk memprediksi besarnya nilai variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis yang diajukan dinyatakan dalam model berikut:

$$Y = a + b.X$$

Informasi :

Y : Pendapatan Pajak (Variabel Dependen) X : Tunggakan Pajak (Variabel Independen) a dan b : Konstanta

Pengujian Hipotesis

1. t-test

Uji t digunakan untuk menentukan apakah variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menentukan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dilakukan uji t dengan membandingkan nilai t yang dihitung dengan tabel t. Pengambilan Keputusan:

Uji T untuk satu variabel dengan dua arah Testing rules:
If $-t_{table} \leq$ tcount, then H0 is accepted If $t_{count} >$ ttable, then H0 is rejected By significance:
If the significance > 0.05, then H_0 is accepted If the significance < 0.05, then H0 is rejected.

2. *Identify Determinants (R_2)*

Koefisien Determinan (R2) digunakan untuk menentukan signifikansi suatu variabel. Oleh karena itu, koefisien determinasi harus dicari, yang menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin besar koefisien determinasi, semakin baik kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada antara nol dan satu (0 < R2 < 1). Nilai R2 yang kecil atau mendekati nol menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya, nilai R2 yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

TEST RESULTS

1. *Descriptive Statistics Test Results*

Gambaran umum variabel penelitian, yaitu tunggakan pajak kendaraan bermotor dan pendapatan pajak kendaraan bermotor, disajikan dalam tabel statistik deskriptif di bawah ini:

Table 2.

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor	9,9834	1,33454	5
Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor	9,6787	,89339	5

Source: Processing SPSS 2026

Berdasarkan tabel 2 di atas, penulis dapat menafsirkan statistik deskriptif variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Pendapatan Pajak
   Berdasarkan uji statistik di atas, nilai rata-rata adalah 9,9834 dengan simpangan baku 1,33454. Nilai rata-rata ini menunjukkan jumlah penerimaan pajak sebesar 9,9834. Nilai rata-rata dan simpangan baku ini menunjukkan bahwa distribusi data baik karena nilai rata-rata lebih besar daripada simpangan baku.
2) Tunggakan Pajak
   Berdasarkan uji statistik di atas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata (mean) adalah 9,6787 dengan simpangan baku sebesar 0,89339. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan jumlah Tunggakan Pajak sebesar 9,6787. Nilai rata-rata dan simpangan baku menunjukkan bahwa terdapat distribusi data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar daripada simpangan baku.

2. *Hasil Pengujian Normalitas Data*

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan pendekatan uji Kolmogorov-Smirnov. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai Asymp. Sig. (2-gagal) lebih besar dari α = 5%. Hasil uji normalitas data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Table 3

Data Normality Test Results
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,09938863
Most Extreme Differences	Absolute	,195
	Positive	,195
	Negative	,154
Test Statistic		,195
Asymp. Sig. (2-tailed)		**,200**

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber : Processing SPSS 2026

Tabel 3 menunjukkan hasil uji normalitas data untuk variabel dalam penelitian ini, yaitu untuk variabel X dan Y, yang menunjukkan bahwa nilai Asymp Sig Kolomogorov-Siminov (K-S) adalah 0,200. Nilai ini menunjukkan bahwa Asymp Sig Kolomogorov-Siminov (K-S) untuk variabel X dan Y dalam penelitian ini lebih besar dari α 5%. Dengan demikian, dapat dibenarkan bahwa semua data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

3. *Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana*

Regresi berguna untuk memprediksi sejauh mana satu atau lebih variabel independen memengaruhi variabel dependen. Analisis regresi yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana hanya digunakan untuk satu variabel independen dan satu variabel dependen. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis yang diajukan dinyatakan dalam model berikut:

$Y = a + bX$

Information :
Y : Pendapatan Pajak (Dependent Variable)
X : Tunggakan Pajak (Independent Variable) a
dan b : Konstanta

Berikut ini adalah hasil uji regresi yang diperoleh :

Table 4
Hasil Uji Regresi Linier Sederhana
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	**4,435**	,624		-7,109	,006
	Tunggakan Pajak Bermotor	**1,490**	,064	,997	23,193	,000

Berdasarkan 4 poin di atas, persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$Y = 4.435 + 1.409 X$

Penjelasan dari angka-angka di atas adalah bahwa jika nilai konstanta (a) adalah 4,435, ini menunjukkan bahwa jika variabel independen tidak berpengaruh, maka jumlah pendapatan pajak adalah 1,409.

4. *Hasil Pengujian Hipotesis*

Uji t digunakan untuk menentukan apakah variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t yang dihitung dengan nilai t tabel.

Kriteria uji dua sisi (Dua ekor), yaitu :

If $t_{count} < t_{table}$ (Positive t_{table}) So H_0 accepted Or
$t_{count} > t_{table}$ (Positive t_{table}) So H_0 rejected.

Based on significance :

If significance > 0,05, So H_0 accepted. If
significance < 0,05, So H_0 rejected.

Berikut ini adalah hasil pengujian hipotesis menggunakan uji statistik t untuk variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai tabel t diketahui pada tingkat signifikansi 5% dengan persamaan berikut :

t_{table} = n – 1 : α / 2
= 5- 1 : 0,05 / 2
= 4 : 0,025
= 2.776

Information :

n : number of samples
1 : konstan

Uji hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu Tunggakan Pajak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen Penerimaan Pajak. Hasil hipotesis ini adalah sebagai berikut:

H_o: Tunggakan pajak kendaraan bermotor tidak memengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Sistem Administrasi Satu Pintu Kota Pekanbaru.

H_a: Tunggakan pajak kendaraan bermotor mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Sistem Administrasi Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

Table 5

Hasil Pengujian Hipotesis Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,435	,624		-7,109	,006
	Motor Vehicle Tax Arrears	1,490	,064	,997	**23,193**	**,000**

Source: Processed Data SPSS 2026

Untuk melihat pengaruh signifikan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Pajak, digunakan uji statistik t. Dari tabel IV.6 di atas, terlihat bahwa nilai t hitung (23,193) > t tabel (2,776) dan berdasarkan probabilitas, nilai sig.t adalah (0,000) < (0,05) sehingga pernyataan hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima. Dari hasil pengujian, ditemukan bahwa Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor.

5. *Hasil Pengujian Identifikasi Determan*

Uji koefisien determinasi (R2) dalam regresi linier sederhana digunakan untuk menentukan persentase kontribusi variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

Persentase ini menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Tabel berikut menunjukkan hasil perhitungan koefisien determinasi (R2):

Table 6
Results of the determination coefficient test (R^2)
Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,997[a]	**,994**	,993	,11476

a. Predictors: (Constant), Motor Vehicle Tax Arrears.
b. Dependent Variable: Motor Vehicle Tax Revenue.
Source: Processed Data SPSS 2026

Dari Tabel 6, uji koefisien determinasi (R2) menunjukkan bahwa kontribusi tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak adalah 0,994, atau 99,4%, sedangkan sisanya 0,6% (100%-99,4%) dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini termasuk penelitian Indra Gunadi tahun 2015, "Pengaruh Jumlah Kendaraan dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Layanan Pajak Primer Sumatera Selatan." Dalam penelitian tersebut, variabel yang tidak diteliti yang memengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah jumlah kendaraan dan tarif pajak kendaraan bermotor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor bervariasi setiap tahunnya tergantung pada jumlah kendaraan, sehingga mengakibatkan fluktuasi tunggakan karena beberapa faktor, yang menyebabkan kurangnya pendapatan bagi Unit Pengelolaan Pendapatan Kota Pekanbaru.

Hasil pengujian hipotesis terlihat dari nilai t hitung (23,193) > t tabel (2,776) dan berdasarkan probabilitas nilai sig.t adalah (0,000) < (0,05) sehingga pernyataan hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima. Dari hasil pengujian, ditemukan bahwa Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor. Kontribusi Tunggakan Pajak terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor adalah 0,994 atau 99,4% dan sisanya 0,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu Jumlah Kendaraan dan Tarif Pajak Kendaraan.

SARAN

1. Diharapkan Samsat Kota Pekanbaru dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu melalui media sosial, spanduk, dan sosialisasi langsung untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.
2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan menyediakan sistem pembayaran yang lebih mudah, cepat, dan modern, seperti pembayaran online atau melalui aplikasi digital untuk mengurangi keterlambatan pembayaran pajak.
3. Perlu diberlakukan sanksi yang lebih ketat, namun tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terhadap wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan kepatuhan masyarakat.

REFERENCES

Asyid, F. F. (2022). "Pengaruh Efektivitas Amnesti Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." Jurnal Literasi Akuntansi, Vol. 2, No. 2, pp. 143–148.

Bulawan, A. T., Yusti, Y., Sabandar, S. Y., & Sau, A. (2026). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kantor Sudiang Samsat Makassar II))." RIGGS: Research Innovation and Governance Studies, Vol. 5, No. 1, pp. 3839–3855.

Government of the Republic of Indonesia.(2022). Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments.
Hidajat, T. 2019. "Non-Compliance with Motor Vehicle Tax Payments." EBBANK Journal, Vol. 10, No. 2.
Kaldha, H., & Triwidatin. (2023). "Pengaruh Program Penghapusan Sanksi Pajak, Pembebasan Biaya Transfer, dan Pembebasan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." Indonesian Journal of Applied and Industrial Sciences (ESA), Vol. 2, No. 4, hlm. 391–410.
Riau Provincial Revenue Agency. Motor Vehicle Tax Arrears Data for 2022–2024.
Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, G. P. (2022). "The Effect of Tax Amnesty Program, Exemption from Transfer Fee, and Tax Socialization on Motor Vehicle Taxpayer Compliance." Journal of Educational Management and Social Sciences, Vol. 3, No. 1.
Subadriyah, S. (2018). "Analysis of the Causes of Motor Vehicle Tax Arrears." Journal of Accounting and Financial Research, Vol. 7, No. 1.
Moertini, V. S., Athuri, A. A., Kemit, H. M., & Saputro, N. (2011). "The Development of Electronic Payment System for Universities in Indonesia: On Resolving Key Success Factors." International Journal of Computer Science Issues.
Utomo, P. G. (2021). "The Influence of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, and the Motor Vehicle Tax Amnesty Program on Motor Vehicle Taxpayer Compliance." Journal of Accounting Science and Research, Vol. 10, No. 4.
Pekanbaru City Samsat. Motor Vehicle Tax Revenue Realization Report for 2022–2024. Tax Administration. (2020). Taxation: Theory and Cases. Jakarta: Salemba Empat.
Qualitative Quantitative Research Methods and R&D. 2022. Bandung: Alfabeta.
Yue, P., Korkmaz, A. G., Yin, Z., & Zhou, H. (2022). "The Rise of Digital Finance: Financial Inclusion or Debt Trap." Journal of Financial Services Research.